

dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai bagian dari kegiatan nasional perlu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan harus dapat berjalan seirama dengan derap pembangunan nasional, seperti yang termaktub di dalam Tap MPR RI Nomor II Tahun 1998 tentang tujuan pembangunan daerah, antara lain:

1. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah serta keseluruhan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan pembangunan nasional sebagai perwujudan wawasan nusantara.
2. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah perlu terus di dorong dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat serta peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.
3. Alokasi perlu ditingkatkan melalui kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sekaligus mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pembangunan daerah atau nasional mempunyai keterkaitan dengan pembangunan otonomi daerah untuk mencapai tujuan nasional. Karena, keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan daerah (Syaukani dkk, 2002: 41).

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000: 17-18).

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat di lihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita regional berdasarkan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun.

Pengertian PDRB sendiri adalah nilai barang dan jasa yang di peroleh dari seluruh faktor produksi yang dihasilkan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga konstan di bagi seluruh jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 1.1
PDRB dan Laju Pertumbuhan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Lapangan Usaha Tahun 1995-2001
(Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
1995	383.792,3	8.22
1996	413.797,9	7.82
1997	433.245,9	4.70
1998	376.374,9	-13.12
1999	379.352,5	0.80
2000	398.016,9	4.92
2001	411.735,5	3.45

Sumber: Pendapatan Nasional Indonesia, BPS, berbagai edisi.

Pada tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia dari tahun 1995-2001. Pada tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa PDB Indonesia cenderung meningkat, yakni pada tahun 1995 sebesar Rp. 383.792,3 triliun hingga tahun 1997 sebesar Rp. 433.245,9 triliun. Pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga PDB tahun 1998 sebesar Rp. 376.374,9 triliun (-13,12%) namun setelah tahun 1998 jumlah PDB Indonesia berangsur membaik dengan tingkat pertumbuhan sebesar yaitu RP. 411.753,5 triliun (3.45%).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata, sepertinya hal Indonesia yang dikenal sebagai *Archipelagic State* (Negara kepulauan) yang memiliki kurang lebih 18000 pulau di seluruh tanah air. Sehingga kesenjangan antar daerah sering kali terjadi serta menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang

BAB VII. Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini berisi kesimpulan yang telah diambil dari tulisan yang di buat serta implikasi yang dikemukakan oleh penulis terhadap hasil yang di buat.

